

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah berada dalam kategori sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memenuhi belanja pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih sangat bergantung pada dana perimbangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya hal ini juga mengindikasikan bahwa kemandirian pemerintah Kabupaten Pohuwato masih tergolong rendah.
2. Kontribusi Dana dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat sangatlah besar setiap tahunnya dan meningkat seiring meningkatkannya belanja daerah. Hal ini pula mengindikasikan bahwa terjadi ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja pembangunannya.
3. Kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan penerimaan daerah masih tergolong kecil, namun jika dibandingkan dengan dana yang berasal dari pendapatan asli daerah, kontribusi dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah masih lebih besar dari kontribusi pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam memenuhi belanja daerahnya masih

bergantung pada pendapatan lain-lain yang sah yang merupakan pembagian bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi

4. Kontribusi pembiayaan terhadap belanja daerah berada pada kategori sangatlah kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa defisit yang terjadi pada Kabupaten Pohuwato sangatlah kecil, sehingga tidak terjadi ketergantungan pada pembiayaan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, sebagai berikut:

1. Mengingat kontribusi PAD bagi belanja daerah sangatlah kecil, maka pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk dapat terus meningkatkan PAD melalui berbagai cara diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu suatu cara untuk memperbesar jumlah pendapatan dimana sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini ditingkatkan jumlah penerimaannya dengan cara mengevaluasi, mengkaji kembali mengenai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah Sedangkan ekstensifikasi yaitu mencari objek baru yang dapat dikenakan Pajak daerah, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu tidak dikenakan pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah memiliki ketergantungan fiskal yang besar terhadap dana perimbangan. Hal ini

mengindikasikan kurangnya kemandirian dari pemertintah Kabupaten pohuwato. Oleh karena itu perlunya evaluasi terhadap penggunaan anggaran belanja daerah, kemudian juga dapat dengan eksplorasi sumber daya alam dan menarik minat investor.

3. Berdasarkan hasil penelitian nilai kontribusi dari lain-lain pendapatan berada dalam kategori kecil. Hal ini harus lebih ditingkatkan seiring dengan meningkatkan PAD dari pemerintah kabupaten Pohuwato. Meningkatkan besaran dari lain-lain pendapatan yang sah dapat ditempuh dengan meningkatkan penerimaan pajak bagi hasil dari pemerintah provinsi dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Selain itu dapat pula ditingkatkan dengan meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro di Bank dengan meningkatkan simpanan daerah dengan tidak melanggar Undang-Undang. Meningkatkan denda atas keterlambatan pembayaran pajak dan retribusi, hal ini selain untuk mendapatkan pendapatan daerah yang lebih banyak, juga memberikan efek jera terhadap para wajib pajak tersebut. Memerapkan denda atas keterlambatan pekerjaan kepada kontraktor karena Kabupaten Pohuwato merupakan daerah yang sedang giatnya membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana daerah. Kemudian yang terakhir adanya ketetapan ataupun aturan mengenai ganti rugi ataupun eksekusi atas jaminan.
4. Pembiayaan dari kabupaten pohuwato masih berkategori kecil kontribusinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya

ketergantungan terhadap pembiayaan dalam menangani defisit anggaran. Hal ini harus terus ditingkatkan hingga tidak ada kontribusi dari pembiayaan terhadap belanja daerah yakni dengan memaksimalkan penerimaan-penerimaan diluar pembiayaan untuk digunakan dalam belanja daerah. Jika Kabupaten Pohuwato dalam menutupi defisit anggarannya, sebaiknya pemerintah Kabupaten Pohuwato harus menyesuaikan besaran pinjaman ataupun pembiayaan dengan kemampuan daerah sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelolah pinjaman daerah. Selain itu jika diperlukan ataupun mendesak pemerintah kabupaten Pohuwato dimungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan mendapat persetujuan dari pemerintah Pusat. Karena segala akibat dan resiko dari penerbitan obligasi daerah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian hal yang paling penting yaitu terus meningkatkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Kabupaten Pohuwato agar tidak terjadi defisiit anggaran sebagaimana yang terjadi selama lima tahun terakhir.